

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN  
HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS III DHARMASRAYA**

*EXECUTIVE SUMMERY*

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan oleh:**

**Syafara Khalisa Rahma**

**2010012111190**

**BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 575/ Pdt/ II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No Reg : 575/ pdt/ II-2024**

Nama : Syafara Khalisa Rahma  
NPM : 2010012111190  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Dalam Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*

**Dr (c) Suamperi, S.H, M.H**

(Pembimbing)



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)**



**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)**

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA DALAM PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DHARMASRAYA

Syafara Khalisa Rahma <sup>1</sup>, Suamperi <sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email : [syafarakhalisa17@gmail.com](mailto:syafarakhalisa17@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*Penitentiary is a place of formation for Assisted Citizens and Correctional Students. The formulation of the problem in this study is (1) How is the fulfillment of the right to health services for prisoners at Dharmasraya class III Correctional Institution (2) What are the obstacles faced by the Correctional Institution to fulfill the right to get health services for prisoners at Dharmasraya class III Correctional Institution (3) What are the efforts made by the Correctional Institution to fulfill the right to get health services for prisoners of the Institution Dharmasraya class III correctional facility. This research uses a sociological juridical type of research. The data used include primary data and secondary data, data collection techniques through interviews and document studies, then the data is analyzed qualitatively. The results of the study (1) The fulfillment of the right to get health services has not been optimal (2) The obstacles faced by the Dharmasraya Penitentiary are the absence of health workers (3) The efforts made are in collaboration with the Dharmasraya District Health Office and the Gunung Medan Health Center.*

**Keywords:** *Penitentiary, Inmate Health, Human Rights*

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara Hukum sangat menghormati prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi Manusia. Dilihat dari segi hukum dan konstitusi, tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Pancasila, Undang-undang Dasar

yang telah di amandemen dan Undang-Undang.<sup>1</sup> Kesehatan merupakan hal mendasar yang wajib dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana. Hal ini memiliki hubungan dengan kenyamanan narapidana selama masa didalam tahanan. Lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas tentunya tentunya membuat narapidana tidak

---

<sup>1</sup> Serlika Aprita & Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor, hlm 68

nyaman di dalam lapas yang dapat mengakibatkan munculnya berbagai macam masalah seperti kerusuhan antar sesama warga binaan, kelebihan kapasitas ini juga dapat mengakibatkan narapidana meninggal di lapas. Over kapasitas di lapas bukanlah masalah baru yang dihadapi, namun sudah sering terjadi di Indonesia.

Setiap narapidana harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal oleh petugas kesehatan, baik itu narapidana yang sakit maupun yang sehat.<sup>2</sup> Narapidana berhak memperoleh kesehatan yang layak yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.. Jika pelayanan kesehatan yang diberikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau dengan kualitas buruk maka akan menimbulkan berbagai penyakit, yang mana hal ini dapat menghambat aktivitas sehari-hari, dan dapat membuat meningkatnya beban lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan ketentraman bagi warga binaan dan tahanan lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini tanggung jawab perdata negara terhadap makanan untuk narapidana yang jika tidak terlaksananya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik maka itu sama saja perbuatan melawan hukum di karenakan salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Berbicara tentang pemidanaan adalah berbicara tentang manusia dan pergulatannya didalam mencari kebenaran dan keadilan.

Hal ini lah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya?
2. Apakah kendala yang di hadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya?
3. Apakah upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas III Dharmasraya
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi pihak

<sup>2</sup> Ali, D., Adwani & Nazaryadi, 2017. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di

Lembaga Pemasarakatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana pada Lembaga Pemasarakatan kelas III Dharmasraya

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasarakatan untuk melakukan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana Lembaga Pemasarakatan kelas III Dharmasraya?

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

1. Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis.
2. Sumber Data  
Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Data Sekunder
3. Teknik Pengumpulan data  
Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara
4. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Dharmasraya

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Bapak Diki Muhari Berti selaku Pengolahan Data Kesehatan

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Dharmasraya mengungkapkan bahwa jumlah narapidana pada lembaga pemasarakatan kelas III Dharmasraya saat ini sudah melebihi kapasitas (*over capacity*) yang berjumlah 248 Warga Binaan sedangkan daya tampung nya hanya 100 orang, dengan tidak adanya tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya di lembaga pemasarakatan kelas III Dharmasraya.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Dharmasraya:  
pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena tidak adanya tenaga kesehatan dan *overcapacity*
2. Upaya dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Dharmasraya adalah

bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya dan Puskesmas Gunung Medan. Kerja sama ini dalam bentuk pemenuhan obat – obatan dan pemeriksaan kesehatan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya

#### **B. Saran**

1. Perlunya adanya tenaga kesehatan di Lapas Dharmasraya
2. Sebaiknya lapas dharmasraya di isi sesuai kapasitas.
3. Menambah ruangan khusus untuk warga binaan yang mempunyai penyakit menular.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Serlika Aprita & Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor.

##### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

##### **C. Sumber Lain**

Ali, D., Adwani & Nazaryadi, 2017. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh. *Law Journal*, 1(1).

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr(c) Suamperi, S.H., M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan nasehat, arahan dan saran yang baik kepada saya, dan terimakasih kepada bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi saya dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya berterimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.